

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/Akuntansi

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten Sijunjung)**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

Siska Yulia Defitri, SE. M.Si/ 1023078301/ Ketua

Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201/Anggota

**UNIVERSITAS MAHA PUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2019**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten Sijunjung)


Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN : 1023078301
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Nomor HP : 085355066166
Alamat surel (e-mail) : siskayd023@gmail.com

Anggota Tim
Nama Lengkap : Juita Sukraini, SE. M.Si
NIDN : 1017116201
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2018/2019
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.500.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 6.500.000,- (Mandiri)

Solok, 21 Februari 2019


1984
Mengttahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Juita Sukraini, SE.M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Siska Yulia Defitri, SE.M. Si)
NIDN. 1023078301

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402

DAFTAR ISI

RINGKASAN

1. PENDAHULUAN	2
2. TINJAUAN PUSTAKA	9
3. METODE	52
4. PEMBAHASAN	67
5. PENUTUP	98
6. JADWAL	100
7. DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS
PUBLIK DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP
KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten Sijunjung)**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial, 2). Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial, 3). Pengaruh pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial, 4). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial secara simultan.

Penelitian ini digolongkan Jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah Kepala OPD, Sekretaris OPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan di OPD pada pemerintahan di Kabupaten Sijunjung. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan t hitung adalah $3.003 > t$ tabel $1,672$, dan nilai signifikan $0,004 < \alpha 0,05$ yang berarti H_1 diterima, 2) Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan t hitung adalah $0.770 < t$ tabel $1,672$, dan signifikan $0,445 < \alpha 0,05$ yang berarti H_2 ditolak, 3) Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan t hitung adalah $0.356 < t$ tabel $1,672$, dan nilai signifikan $0.723 > \alpha 0,05$, 4). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial

Kata kunci : Desentralisasi, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Kinerja Manjerial.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua undang-undang tersebut telah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Akibat dari disahkannya undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut ialah organisasi sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam hal ini setiap daerah harus mampu mengelolah daerahnya sendiri. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang

diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi sektor publik karena melalui kinerja, tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi dapat dilihat. Untuk mengetahui apakah kinerja suatu organisasi telah berjalan efektif atau tidak, dapat dilakukan uji perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal yang baik dalam menilai kinerja. Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Beny (2012), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Kinerja manajerial OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini dapat menggambarkan sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah

yang selanjutnya, dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja manajerial yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki. Salah satunya kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang jelas juga akan mempermudah Organisasi Perangkat Daerah(OPD) untuk menyusun target anggaran. Kemudian, target-target anggaran yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing OPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Deki (2013) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan menurut Ofalyn (2015) Kejelasan sasaran anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Sejalan dengan kejelasan sasaran anggaran, terdapat juga prinsip lainnya, yakni akuntabilitas publik yang mendasari penerapan *good governance* di lingkungan organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sebagai bagian dari terciptanya *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di Indonesia. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial karena dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Deki; 2013), sedangkan menurut Ofalyn (2015) Akuntabilitas publik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Bukan hanya faktor akuntabilitas publik saja, tetapi faktor pengendalian akuntansi juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajerial. Pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode yang berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan

serta menjamin ketelitian data keuangan. Biasanya sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat, pemegang atau penjaga barang/harta, dan pemeriksa intern. Menurut Ofalyn (2015) Pengendalian akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Manajerial
- b. Apakah Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh terhadap Kinerja Manajerial
- c. Apakah Pengendalian Akuntansi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Manajerial
- d. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Manajerial

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- e. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial
- f. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial
- g. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial
- h. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi secara simultan terhadap Kinerja Manajerial.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehubungan dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mengetahui arti pentingnya kejelasan sasaran anggaran,

akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi dalam pengambilan kebijakan terhadap kinerja manajerial.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahamannya, maka penelitian memformulasikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada ini membahas tentang latar belakang penulisan proposal penelitian ini sekaligus latar belakang penelitian ini, apa yang menjadi rumusan masalah pada penulisan proposal penelitian ini, maksud atau tujuan penulisan proposal ini, manfaat yang diperoleh dari penulisan proposal penelitian dan dari penelitian sendiri serta untuk menggambarkan sistematika penulisan dari proposal penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, pengendalian akuntansi, kinerja manajerial, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variable, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis, dan uji hipotesis.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran

2.1.1 Pengertian Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan pengertian anggaran yaitu; Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Erlina, dkk (2012:16) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Sedangkan menurut Paramhita (2016) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran biasanya disebut perencanaan dan pengendalian laba, yaitu proses yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian secara efektif.

Dalam organisasi sektor pemerintahan, anggaran dilakukan untuk sebuah proses mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas sehingga anggaran diungkapkan sebagai peran yang strategis dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik (pemerintahan).

2.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut Erlina, dkk (2012:18), beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran komprehensif, sebuah bagian unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat komunikasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran pada suatu perusahaan atau instansi ada 7, yang pertama yaitu merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga anggaran sebagai alat kebijakan, keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, keenam sebagai alat penilai kinerja dan yang terakhir anggaran sebagai alat komunikasi.

Fungsi anggaran pada suatu perusahaan atau instansi dapat membantu manajemen dalam pelaksanaan tugasnya dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman kerja untuk mencapai tujuan perusahaan atau instansi yang telah ditetapkan. Contohnya bisa kita ambil dalam pengambilan atau menentukan kebijakan, apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah

melakukan kebijakan fiskal yang ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

2.1.3 Jenis-jenis Anggaran

Menurut Nordiawan (2010:50), jenis anggaran sektor publik terbagi lima berdasarkan jenis aktiva, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, berdasarkan status hukumnya, yaitu anggaran tentatif dan anggaran enacted, berdasarkan pemerintahan, yaitu kekayaan negara/anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, anggaran tetap dan anggaran fleksibel, berdasarkan penyusunannya, yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif.

1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal

Anggaran operasional adalah digunakan untuk merencanakan kebutuhandalam menjalankan operasi sehari-hari (waktu satu tahun), sedangkananggaran modal adalah menunjukkan rencana jangka panjang danpembelajaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan,perabot, dan sebagainya.

2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted

Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahandari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya, sedangkan anggaran enacted adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus

Anggaran dana umum adalah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari, sedangkan anggaran dana khusus adalah dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel

Anggaran tetap adalah apropriasi belanja yang sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan, sedangkan anggaran fleksibel adalah harga barang atau jasa per unit yang telah ditetapkan, namun jumlah anggaran keseluruhan akan berfluktuasi berpengaruh pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif

Anggaran eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, sedangkan anggaran legislatif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa keterlibatan pihak eksekutif.

Sebagai alat bantu manajemen, anggaran perusahaan mempunyai lingkup yang luas. Anggaran perusahaan terdiri dari berbagai macam jenis yang mempunyai kegunaan masing-masing. Agar tidak terkecoh oleh beragam jenis anggaran perusahaan, maka setiap individu di dalam suatu perusahaan atau instansi dituntut untuk mengetahui bagaimana penggolongan anggaran yang benar sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penggunaan anggaran.

Jadi anggaran sektor publik terbagi atas lima jenis, berdasarkan jenis aktiva yaitu anggaran operasional dan anggaran modal, berdasarkan status hukumnya, yaitu anggaran tentatif dan enacted, berdasarkan pemerintahan, yaitu kekayaan negara/anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, anggaran tetap dan anggaran fleksibel, berdasarkan penyusunannya, yaitu anggaran eksekutif dan anggaran legislatif.

2.1.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran

Ketentuan penyusunan anggaran juga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran di sektor publik, yaitu pada pemerintah daerah. Anggaran yang disusun pada pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31/2016 tentang "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017". Dalam proses penyusunan APBD, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD
5. Partisipasi, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal penyusunan anggaran yaitu penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.1.5 Mekanisme Penyusunan Anggaran

Menurut Ahyari (2008:5) dalam Ofalyn (2015), sebelum anggaran dikeluarkan dan disetujui, anggaran harus disusun dengan mekanisme yang tepat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Tahap ini merupakan suatu tindakan yang melihat jauh ke depan dengan mengkoordinasikan alat produksi, jasa, tindakan, dan metode prosedur yang bertujuan untuk mencapai hasil atau sasaran yang

ditetapkan dengan cara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam tahap ini, manajemen puncak memutuskan suatu rencana umum yang mencakup sasaran usaha dan program kerja secara luas.

2. Perkiraan

Tahap ini merupakan tahapan dari penyusunan anggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan biaya sesuai dengan sasaran dan program kerja di atas yang direncanakan oleh para kepala pusat pertanggungjawaban operasi.

3. Penyesuaian

Dalam tahap ini, tingkatan manajemen di atas para kepala pertanggungjawaban operasi mempelajari, mendiskusikan, mengadakan penyesuaian apabila diperlukan, dan menyetujui hasil tahap perencanaan serta tahap perkiraan di atas. Selain itu, pada tahap ini juga harus disesuaikan antara jumlah anggaran dengan jumlah kebutuhan perusahaan.

4. Implementasi

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran yang telah disetujui guna mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, tahap implementasi juga harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik yang berhubungan dengan tersedianya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

5. Evaluasi

Setelah pelaksanaan anggaran, secara periodik perlu diadakan evaluasi dengan membandingkan realisasi dan anggarannya serta mengadakan tindak perbaikan untuk periode berikutnya. Jika pada tahap implementasi telah didukung oleh sistem yang baik, maka diharapkan pada tahap evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

Mekanisme penyusunan anggaran diawali dengan perencanaan, perkiraan, penyesuaian, implementasi dan evaluasi. Manajemen puncak memutuskan suatu rencana umum yang mencakup sasaran usaha dan program kerja secara luas, kemudian dibuat perkiraan-perkiraan seperti perkiraan pendapatan dan biaya sesuai dengan sasaran dan program kerja yang telah diputuskan. Selain itu jumlah anggaran harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan perusahaan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan anggaran yang telah disetujui guna mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Terakhir, perlu diadakan evaluasi dengan membandingkan realisasi dan anggarannya serta mengadakan tindak perbaikan untuk periode berikutnya. Jika pada tahap implementasi telah didukung oleh sistem yang baik, maka diharapkan pada tahap evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979) dalam Ofalyn (2015), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Sasaran anggaran yang jelas ini tentunya akan membantu aparat pelaksana anggaran untuk mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang jelas juga akan mempermudah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyusun target anggaran. Kemudian, target-target anggaran yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Ofalyn (2015), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Penentuan sasaran anggaran secara spesifik akan membuat suatu organisasi menjadi lebih produktif dibandingkan jika tidak ada penentuan

sasaran. Hal tersebut akan mendorong karyawan untuk dapat melakukan kinerja yang terbaik. Kesenjangan anggaran merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran menggambarkan seberapa luas suatu sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan, dan ketidakpuasan dari karyawan sehingga akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial.

2.3 Akuntabilitas Publik

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2011) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, akuntabilitas juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas, baik dalam bentuk fungsinya, program, dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public disclosure*), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan.

Menurut Mardiasmo (2011) indikator untuk pengukuran akuntabilitas publik yaitu:

1. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

3. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

4. Akuntabilitas Kejujuran dan Akutabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku.

2.3.2 Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan

Menurut Ofalyn (2015:25), pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumberdana yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undanganyang berlaku, dan apakah penggunaan dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana termuat dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jadi, dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi. Akuntabilitas dalam laporan keuangan menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumberdana yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undanganyang berlaku, dan apakah penggunaan dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sebagaimana termuat dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baikatau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

2.3.3 Sifat Akuntabilitas Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2011), laporan keuangan pemerintah dapat dipakai untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah dapat dipandang dari perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* Sadjiarto (2000:140) dalam Ofalyn (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai suatu entitas

pemerintahan dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrative
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaiantujuan, manfaat, dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, *American Accounting Association* Sadjiarto (2000:140) dalam Ofalyn (2015) akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Process accountability*

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating, and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada tahap ini, dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan ekonomis (*efficient and economy*).

4. *Program accountability*

Pada tahap ini, akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Dari perspektif sistem akuntabilitas, *American Accounting Association* Sadjiarto (2000:140) dalam Ofalyn (2015) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas, yaitu:

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*)
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atassuatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa konsep akuntabilitas publik didasari pada persepsi atau pemikiran bahwa rakyat tidak hanya berhak mengetahui pada pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga nonkeuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan akuntabilitas kerja.

Dengan terwujudnya akuntabilitas kerja, diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi akuntabilitas menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan prinsip demokrasi.

Akuntabilitas pemerintah dari 3 perspektif, yang pertama dari perspektif akuntansi yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya finansial, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif, efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan dan hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas. Yang kedua dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Yang terakhir dari perspektif sistem akuntabilitas terdapat beberapa karakteristik yaitu,berfokus pada hasil (outcomes), menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atassuatu program atau kebijakan, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktudan melaporkan hasil (outcomes) dan mempublikasikannya secara teratur

2.4 Pengendalian Akuntansi

2.4.1 Pengertian Pengendalian Akuntansi

Menurut Anthony (2015:3) pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang

sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi (2016:163), pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode yang berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan serta menjamin ketelitian data keuangan. Biasanya sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat, pemegang atau penjaga barang/harta, dan pemeriksa intern. Pengendalian akuntansi dirancang untuk meyakinkan:

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus.
2. Transaksi dicatat agar memudahkan:
 - a. Penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut.
 - b. Mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva.
3. Penggunaan atas aktiva atau harta diberikan hanya dengan persetujuan manajemen.
4. Jumlah aktiva seperti yang terdapat pada laporan catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan, dilakukan tindakan yang tepat.

Menurut Anthony (2015) pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu:

1. Tujuan audit, evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk
2. Proses evaluasi
3. Anggaran
4. Perencanaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi diperlukan untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi serta memudahkan organisasi dalam penjagaan kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian data keuangan. Sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat, pemegang atau penjaga barang/harta, dan pemeriksa intern.

Pengendalian akuntansi dirancang untuk meyakinkan bahwa transaksi-transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus, transaksi dicatat agar memudahkan penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut dan mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva, penggunaan atas aktiva atau harta diberikan hanya dengan persetujuan manajemen dan jumlah aktiva seperti yang terdapat pada laporan catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan, dilakukan tindakan yang tepat.

2.4.2 Prinsip-prinsip Dasar Pengendalian Akuntansi

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu perusahaan harus mempunyai enam prinsip dasar menurut Hartadi (1992:130) dalam Ofalyn (2015), yaitu:

1. Pemisahaan fungsi

Adanya pemisahan fungsi-fungsi akan dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Selain itu, ditinjau dari sistem pengendalian adanya pemisahan fungsi, akan terdapat suatu cek silang (*cross check*) secara otomatis atas suatu pekerjaan atau pelaksanaan suatu transaksi. Tujuan utama pemisahan fungsi ialah menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Otorisasi dapat berupa otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum menyangkut kondisi umum, misalnya adanya otorisasi terhadap daftar harga standar (yang dibakukan) dan kebijakan kredit untuk penjualan.

Otorisasi khusus berhubungan dengan transaksi perorangan, yaitu otorisasi penjualan khusus, penggajian atau transaksi pembelian. Bukti otorisasi khusus adalah adanya dokumentasi pada terjadinya transaksi.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang layak adalah penting untuk terciptanya sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberikan dasar

penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Dokumentasi dapat berbentuk dalam faktur-faktur, *voucher-voucher* (bukti perintah mengeluarkan uang), tanda tangan, initial/paraf, dan cap persetujuan. Pemberian angka cetak pada setiap jenis dokumen adalah membantu terciptanya memelihara pengawasan transaksi.

4. Prosedur dan catatan akuntansi

Prinsip ini menekankan pencatatan transaksi dalam bagian akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah: Pertama, dapat disisipkan atau dibuatnya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat. Kedua, data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Di sini diperlukan adanya buku pegangan prosedur akuntansi dan bagan rekening (*chart of accounts*). Bagan rekening memberi dasar untuk mengadakan klasifikasi transaksi dan membantu penyiapan laporan keuangan.

5. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan:

- a. Alat keamanan dan ukuran untuk menyelamatkan aktiva, catatan akuntansi, dan formulir tercetak yang gagal penggunaannya.
- b. Penggunaan alat yang mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Pengawasan fisik yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi, meliputi *cash register* yang mekanis dan elektronis.

6. Pemeriksaan intern secara bebas

Prinsip ini dirancang untuk menentukan apakah unsur-unsur yang laindalam sistem bekerja atau tidak. Agar unsur ini efektif, maka ada tiga syarat:

- a. Pengawasan dilakukan oleh pihak perusahaan yang bebas dan yangbertanggung jawab untuk data tersebut.
- b. Pengawasan (*monitoring*) harus dilakukan pada saat atau waktu yangberalasan dan mendadak (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu).
- c. Penyimpangan harus dilaporkan kepada manajemen dan pihak yangberhak mengambil tindakan perbaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan, seperti pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana, dan pengamanan dari penggunaan tidak sah.

Suatu perusahaan harus mempunyai enam prinsip dasar untuk mencapai tujuan pengendalian akuntansi, yaitu pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik yang berhubungan dengan alat keamanan dan ukuran untuk menyelamatkan aktiva, catatan akuntansi dan formulir tercetak yang gagal penggunaannya dan pengawasan fisik yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi, meliputi *cash register* yang mekanis dan elektronik serta pemeriksaan intern secara bebas.

2.5 Kinerja Manajerial

Menurut Rudianto (2013:186), kinerja manajerial adalah kemampuan para manajer untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan demi memperoleh laba dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan menurut Natalia (2010), kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen self rating dan setiap responden diminta untuk mengukur kinerja sendiri ke dalam delapan dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta satu dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian, dan kepala bidang secara keseluruhan. Menurut Ofalyn (2015) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.

Kinerja manajerial juga merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja keuangan dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Digunakannya kinerja manajerial sebagai bentuk pengukuran kinerja keuangan disebabkan oleh kinerja manajerial yang mencakup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang merupakan salah satu hal penting dalam sisi kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merupakan satuan unit

kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan belanja daerah.

Dalam penentuan pengukuran kinerja keuangan, diperlukan hal-hal yang menyangkut dengan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal-hal yang telah disebutkan di atas dapat diukur dengan kinerja manajerial.

Menurut Sinuraya (2009:8) dalam Ofalyn (2015), kinerja manajerial diukur dengan menggunakan indikator:

1. Perencanaan

Adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnyadilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoma dantata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran, danprogram kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Investigasi

Merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Koordinasi

Menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.

4. Evaluasi

Adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerjasehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.

5. Pengawasan

Yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.

6. Pemilihan Staff,

Yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.

7. Negosiasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.

8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja manajerial didefinisikan sebagai seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja manajerial merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja keuangan dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kinerja tersebut dinyatakan efektif apabila tujuan anggaran tercapai dan bawahan mendapatkan kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran serta memotivasi bawahan untuk mengidentifikasi dan melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran, menerima kesepakatan anggaran, dan melaksanakannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian terdahulu dan mendapatkan ide serta pengetahuan dari peneliti sebelumnya.

Penelitian Netty Herawaty (2011) judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja, sedangkan Hasil Penelitian Beny Arifin W (2012) dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi, hasilnya menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mei Anjarwati (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran (KSA), pengendalian akuntansi (PA), dan sistem pelaporan (SP), secara simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Deki Putra (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas public dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Sedangkan Nurhalimah, dkk (2013) melakukan Penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh hasilnya menunjukkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.

Angreini dan Sherly (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Milik

Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, artinya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung meskipun belum dianggap penting dalam pelaksanaannya. Penelitian Harini Susilowati (2014) berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, hasilnya menunjukkan bahwa Variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan tiga variabel lain yang diteliti yaitu variabel pengendalian akuntansi, variabel sistem pelaporan, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Ofalyn Octarya Sitepu (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian Ni Made Mega Cahyani dan I Made Karya Utama (2015) berjudul

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja dengan hasil menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Bobby (2016) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD Bengkalis), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, Sistem pelaporan, dan Desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Bengkalis.

Review atas penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Netty Herawaty (2011)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja

2	Beny Arifin W(2012)	PengaruhPartisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan nSistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel IPemoderasi	Variabel Independen: Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan nSistem Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Variabel Pemoderasi : Komitmen Organisasi	Partisipasi anggaran n,kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Mei Anjarwati (2012)	Pengaruh KejelasanSasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel Independen: Kejelasan Sasara nAnggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran(KSA), pengendalian akuntansi (PA), dan sistem pelaporan (SP), secara simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
4	Deki Putra a(2013)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasara nAnggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan	Variabel Independen: Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasara nAnggaran Variabel Dependen: Kinerja Manajerial	Akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.

		Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiri s SKPD Kota Padang)		
--	--	--	--	--

5	Nurhalimah,dkk (2013)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.
6	Angreini, Sherly Pinatik(2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung, artinya kejelasan sasaran anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung meskipun belum dianggap penting dalam pelaksanaannya.

7	Harini Susilowati (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan tiga variabel lain yang diteliti yaitu variabel pengendalian akuntansi, variabel sistem pelaporan, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
---	--------------------------	---	---	--

8	Ofalyn Octarya Sitepu(2015)	PengaruhPartisipasiPenyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi Variabel Dependen: Kinerja Manajerial	Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
9	Ni Made Mega Cahyani dan I Made Karya Utama (2015)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Variabel Dependen: Akuntabilitas Kinerja	Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja
10	Boby Arona Putra (2016)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Variabel Dependen: Akuntabilitas	Kejelasan sasaran anggaran, Sistem pelaporan, dan Desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Bengkalis. Namun Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap

		Bengkalis)	Kinerja	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Bengkalis.
--	--	------------	---------	---

2.7 Kerangka Konseptual

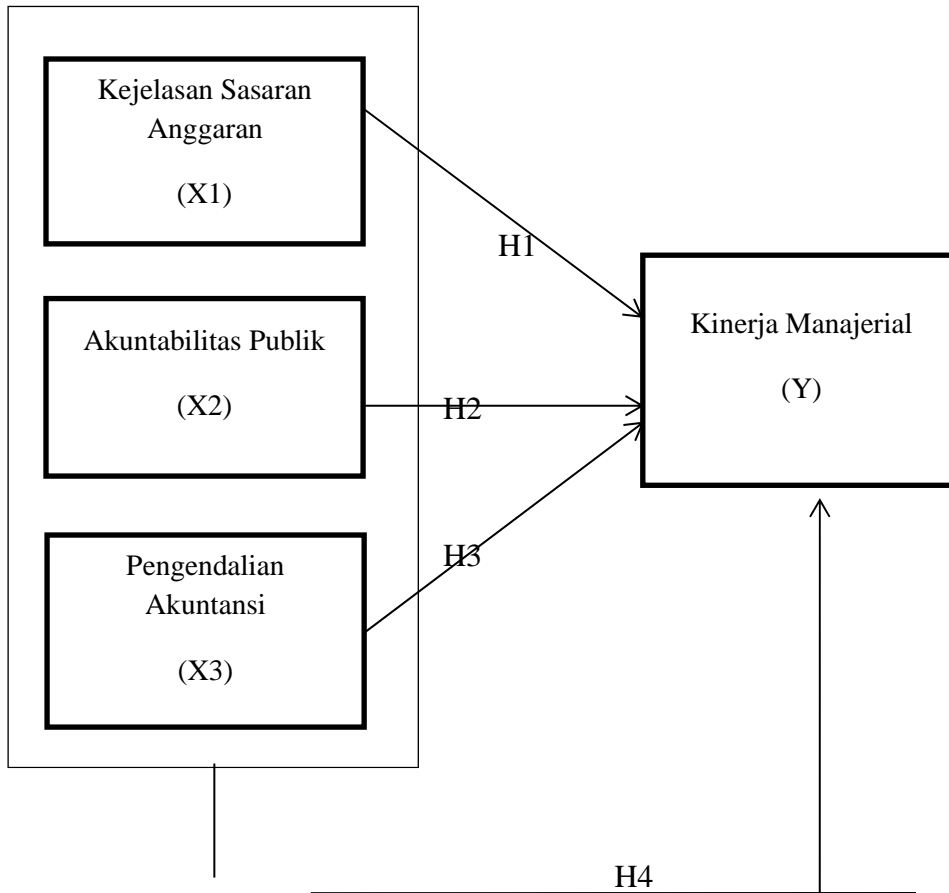
Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara variabelsatu terhadap variabel lainnya dari penelitian yang akan diteliti.

Kenis dalam Pratiwy (2013:3) mengungkapkan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan tentunya akan mempengaruhi kinerja manajerial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran anggaran yang jelas juga akan mempermudah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyusun target anggaran. Kemudian, target-target anggaran yang disusun akan disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Sejalan dengan kejelasan sasaran anggaran, terdapat juga prinsip lainnya, yakni akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2011), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial karena dengan adanya akuntabilitas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dalam bentuk penyajian informasi keuangan organisasi.

Pengendalian akuntansi juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja manajerial. Menurut Mulyadi (2016:163), pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode yang berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan serta menjamin ketelitian data keuangan. Biasanya sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat, pemegang atau penjaga barang/harta, dan pemeriksa intern. Dengan kata lain, pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan, seperti pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana, dan pengamanan dari penggunaan tidak sah.

Adapun hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial dapat dilihat pada kerangka konseptual pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka
Konseptual



2.8 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2014;122) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan kemudian sebuah

kesimpulan. Sehubungan dengan uraian diatas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.8.1 Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Kenis (1979) dalam Deki Putra (2013) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan

dicapai oleh pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing OPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam penelitian Deki Putra (2013) dinyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan dalam penelitian Ofalyn (2015) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

2.8.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Deddi (2010) pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja manajerial.

Pada penelitian Ofalyn (2015), Akuntabilitas publik secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dalam penelitian Deki Putra (2013) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif

terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian hipotesis alternatif yang diambil untuk penelitian ini adalah:

H2 : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

2.8.3 Pengaruh Pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Suatu anggaran walaupun telah disusun secara komprehensif dan rinci serta melalui penyusunan yang akurat, biasanya pada saat pelaksanaan anggaran tersebut sering mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang tidak diperhatikan sebelumnya. Untuk mengetahui dan menghindari penyimpangan tersebut maka diperlukan peran pengendalian akuntansi.

Dalam penelitian Ofalyn (2015), Pengendalian Akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

H3 : Pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

2.8.4 Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran

kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Deddi, 2010).

Pengendalian akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spectrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan karyawan di suatu organisasi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi pemerintah daerah membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2012:11) Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif juga untuk mendapatkan fakta-fakta baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi sebagai variabel independen terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan survey. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden dan responden tersebut memberikan jawabannya. Kuesioner yang digunakan

merupakan adopsi dari kuesioner pada penelitian terdahulu, yaitu: Ofalyn (2015).

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:119), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala, Seketaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sjunjung yang berjumlah 35 OPD.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel penelitian ini adalah Kepala, Seketaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sjunjung yang berjumlah 35 OPD.

Tabel 3.1
Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
3	HidupDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
4	Dinas Pangan dan Perikanan
5	Dinas Kependudukan dan
6	CapilDinas Perhubungan
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
8	RagaDinas Pertanian
9	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan
10	MenengahBadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11	Daerah
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
14	SDMDinas Pekerjaan Umum dan
15	Penataan Ruang
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
17	AnakDinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
20	BerencanaDinas Kesehatan
21	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
23	PintuSatuan Polisi Pamong Praja
24	Sekretariat
25	Daerah
26	Sekretariat
27	DPRD
28	Inspektorat
29	Daerah RSUD
30	Sijunjung
31	Badan Penanggulangan Bencana
32	DaerahKantor Kesbangpol dan
33	Linmas
34	Kantor Camat Sijunjung
35	Kantor Camat Lubuk Tarok
	Kantor Camat Tanjung

Gadang Kantor Camat Kamang Baru Kantor Camat Koto VII Kantor Camat Sumpur Kudus Kantor Camat Kupitan Kantor Camat IV Nagari

3.5 Variabel Penelitian

Menurut sugiyono (2014:18) Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.

1. Variabel independen (X) adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Akuntabilitas Publik (X2), dan Pengendalian Akuntansi (X3).
2. Variabel dependen (Y) adalah Kinerja Manajerial

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah operasionalisasi konsep agar dapat diteliti atau diukur melalui gejala-gejala yang ada. Definisi operasional yang digunakan untuk penelitian ini akan diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Akuntabilitas Publik (X2)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintapertanggungjawaban tersebut.

3. Pengendalian Akuntansi (X3)

Pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

4. Kinerja Manajerial (Y)

Kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah.

Tabel 3.2

Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. (Kenis, 1979 dalam Ofalyn, 2015)	1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka Waku 5. Sasaran Prioritas 6. Tingkat Kesulitan 7. Koordinasi (Kenis, 1979 dalam Ofalyn, 2015)	Likert
Akuntabilitas Publik (X2)	Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut . Mardiasmo (2011)	1. Kebijakan 2. Program 3. Proses 4. Hukum Mardiasmo (2011)	Likert
Pengendalian Akuntansi (X3)	Menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas- aktivitas organisasi	1. Tujuan audit 2. Proses evaluasi 3. Anggaran 4. Perencanaan (Anthony, 2015)	Likert

	(Anthony, 2015:3)		
--	-------------------	--	--

Kinerja Manajerial (Y)	Hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. (Mahoney dalam Natalia, 2010)	1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Pengkoordinasian 4. Evaluasi 5. Pengawasan 6. Pemilihan Staff 7. Negosiasi 8. Perwakilan (Mahoney dalam Natalia, 2010)	Likert
------------------------	---	---	--------

3.7 Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan peneliti adalah skala Likert, yaitu dengan menyusun pertanyaan atau pernyataan yang masing-masing item diberi range skor. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala Likert menggunakan lima tingkat jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.3
Instrumen Skala Likert

No	Skala	Score
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010)

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penelitian. Sugiyono (2012:168) menyatakan bahwa: valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena itu instrumen yang valid dan reliabel menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Hasil penelitian validasi ditunjukkan oleh suatu indeks yang menjelaskan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Dengan kata lain suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan di ukur oleh kuisioner tersebut. Uji validasi bertujuan untuk melihat ketetapan instrumen pengukuran dalam penelitian. Pengujian ini untuk mengetahui ketepatan instrumen penelitian agar dapat memberikan informasi yang akurat tentang hal yang diukur.

Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel melalui program SPSS versi 22. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai hitung $r_{hitung} > r_{tabel}$. Teknik yang digunakan untuk pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi produk moment pearson dengan menggunakan SPSS 22 for windows reabilitas.

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan one shot. Pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistic Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ Ghazali (2011:160). Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22.

3.8.2 Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung multikolinieritas serta heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknyamasing-masing variabel penelitian. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* Ghazali (2011:160) dengan bantuan komputer program SPSS. Data pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas dimana jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Uji asumsi multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (*independent*) satu dengan variabel bebas (*independent*) yang lainnya.

Dalam analisis regresi ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya (*dependent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance $> 0,1$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scetterlot. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRIESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang teah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized. Berdasarkan scatterplot dibawah terlihat titik–titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka Nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

3.8.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*). Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan beberapa variabel independen dalam suatu model produktif tunggal.

1. Uji signifikan parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2011:98) uji t dilakukan untuk mengetahui berarti tidaknya suatu variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen secara parsial. Keputusan uji parsial hipotesis dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $|t \text{ hitung}| > |t \text{ table}|$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variable bebas dengan variable terkait.
- b. Jika $|t \text{ hitung}| < |t \text{ tabel}|$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variable bebas dengan variable terikat.

2. Uji simultan (uji F)

Menurut Ghozali (2011:98) uji-F digunakan untuk menguji koefisien bersama-sama, sehingga nilai dari koefisien regresi tersebut dapat diketahui secara bersama. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel dependen secara simultan atau tidak, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila $|F \text{ hitung}| > |F \text{ table}|$ atau memiliki tingkat signifikan $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X_1 , X_2 secara simultan terhadap Y .
- b. Apabila $|F \text{ hitung}| < |F \text{ tabel}|$ atau memiliki tingkat signifikan $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara X_1 , X_2 secara simultan terhadap Y .

3.8.4 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Analisis regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat (Ridwan (2012:108)).

Menurut Sugiyono (2012:275) analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ dan nilai probabilitas signifikansi kurang dari $0,05$, maka hipotesis diterima dengan alternatif semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kinerja Manajerial

a = Konstanta Regresi

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂ = Akuntabilitas Publik

X₃ = Pengendalian Akuntansi

e = Error

3.8.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, Ghozali (2011:97). Nilai koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, Ghozali (2011:97). Kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka (R^2) pasti akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted (R^2) untuk mengevaluasi model regresi karena Adjusted (R^2) dianggap lebih baik

dari nilai (R^2) yang dapat naik atau turun apabila satu variable independen ditambahkan ke dalam model regresi, Ghozali (2011:97).

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Menurut tambo, kabupaten Sijunjung sudah ada sejak tahun 10 M yang merupakan pusat Kerajaan Jambu Lipo. Kerajaan Jambu Lipo ini berpusat di Kecamatan Lubuk Tarok yang terdiri dari tiga Nagari yaitu, Nagari Lalan, Nagari Buluh Kasok, dan Nagari Lubuk Tarok. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Dungku Dangaka yang berhubungan erat dengan Kerajaan Majapahit di Jawa. Kemudian dalam perkembangannya, Kerajaan Jambu Lipo ini menjadi salah satu sopiah balahan Kerajaan Pagaruyung Darul Qorar.

Selanjutnya, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari lima Onderafdeling pada masa Hindia Belanda. Kabupaten Sijunjung pada saat itu berada di bawah Afdeling Solok yang berpusat di Sawahlunto. Kemudian, pada masa jajahan Jepang hanya diganti namanya saja yaitu, Syu (wilayah keresidenan), Bansyu (wilayah afdeling), Gun (wilayah distrik atau kedemangan/ kewedanaan), Fuku Gun (onderdistrict/ kecamatan), dan Son (wilayah nagari) (Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau, 2012:1329-1331).

Sedangkan pada masa kemerdekaan, Kabupaten Sijunjung merupakan

bagian dari Kewedanaan Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk pada bulan Oktober 1945 dengan Ibukota Sawahlunto. Kabupaten Sijunjung pada saat itu bernama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang pada tanggal 10 Maret 2008 secara resmi diubah namanya menjadi Kabupaten Sijunjung sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2008. Kabupaten Sijunjung ini terdiri dari 54 nagari, 1 desa, dan 8 kecamatan yang ibukotanya berada di Muaro Sijunjung. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengkehendaki perubahan nama yang dilihat dari faktor historisnya bawa Kabupaten Sijunjung pada zaman awal kemerdekaan merupakan kewedanaan Sawahlunto.

Selain itu, Kabupaten Sijunjung merupakan Kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat. Namun, sejak tahun 2004 Dharmasraya melakukan pemekaran daerah yang menghasilkan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini sesuai dengan UU No.38/ 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, Kabupaten Sijunjung menjadi kabupaten tersempit kedua di Sumatera Barat (Wikipedia.org).

4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Sijunjung

Pemerintah Kabupaten Sijunjung saat ini dipimpin oleh Bupati Drs. Yuswir Arifin, MM dan Wakil Bupati H. Arrival Boy, SH. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung meliputi 8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa dengan 299 Jorong. Berikut daftar wilayah Kabupaten Sijunjung.

Tabel 4.1 Daftar wilayah di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%	Jumlah Penduduk (ribu)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Kamang Baru	837.80	26.76	47.17	11	61
2.	Tanjung Gadang	459.79	14.69	24.43	9	41
3.	Sijunjung	748.00	23.89	44.65	9	56
4.	Lubuk Tarok	187.60	5.99	14.93	6	24
5.	IV Nagari	96.30	3.08	16.14	5	17
6.	Kupitan	82.01	2.62	13.60	3+1 desa	9+5 dusun
7.	Koto VII	143.90	4.60	36.54	7	36
8.	Sumpur Kudus	575.40	18.38	25.05	11	55
Total		3 130.80	100.00	222.51	61+1 desa	299+ 5 dusun

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala OPD, Seketaris OPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan di OPD pada Pemerintah Kabupaten Sjunjung yang berjumlah 35 OPD Se-Kabupaten Sijunjung. Kuesioner yang disebar berdasarkan sampel adalah sebanyak 98 kuesioner, sedangkan kuesioner yang kembali sebanyak 57 kuesioner, dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 48 kuesioner, Jadi berdasarkan dari data yang telah terkumpul dan yang telah diperiksa makadata yang diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 dari 105 kuesioner yang telah disebar.

Tabel 4.2**Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung**

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Responden
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 orang
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3 orang
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	3 orang
4	Dinas Pangan dan Perikanan	3 orang
5	Dinas Kependudukan dan Capil	3 orang
6	Dinas Perhubungan	3 orang
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3 orang
8	Dinas Pertanian	3 orang
9	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3 orang
10	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3 orang
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3 orang
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3 orang
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 orang
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 orang
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 orang
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 orang
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 orang
18	Dinas Kesehatan	3 orang
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3 orang
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 orang
21	Satuan Polisi Pamong Praja	3 orang
22	Sekretariat Daerah	3 orang
23	Sekretariat DPRD	3 orang
24	Inspektorat Daerah	3 orang
25	RSUD Sijunjung	3 orang
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3 orang
27	Kantor Kesbangpol dan Linmas	3 orang
28	Kantor Camat Sijunjung	3 orang
29	Kantor Camat Lubuk Tarok	3 orang
30	Kantor Camat Tanjung Gadang	3 orang
31	Kantor Camat Kamang Baru	3 orang
32	Kantor Camat Koto VII	3 orang
33	Kantor Camat Sumpur Kudus	3 orang
34	Kantor Camat Kupitan	3 orang
35	Kantor Camat IV Nagari	3 orang
Jumla		105 orang

h	
----------	--

Tabel 4.3
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
Jumlah Kuesioner yang disebar	105	100
Jumlah kuesioner yang diterima	57	54,3
Jumlah kusioner yang tidak kembali	48	45,7
Kuesioner yang diolah	57	54,3%

Sumber : data primer di olah 2018

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dikirimkan langsung kepada pejabat eselon II, III, dan IV di Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dari 105 kuesioner yang disebar 57 kuesioner yang dikembalikan dan 48 kuesioner yang tidak dikembalikan (cacat). Tingkat pengembalian (response rate) yang diperoleh adalah 54,3%.

Adapun responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini di tunjukan pada table 4.4

Tabel 4.4
Karakteristik Responden

Klasifikasi	Jumlah	%
Jenis kelamin		
1. Laki-laki	33	57,9%
2. Perempuan	24	42,1%
Jumlah	57	100%
Tingkat pendidikan		
1. SMA/SMK	6	10,5%
2. Diploma	2	3,5%
3. S1	32	56,1%
4. S2	17	29,9%
Jumlah	57	100%
Masa kerja		
1. 1-5 tahun	0	0
2. 5-10 tahun	1	1,8%
3. > 10 tahun	56	98,2%
Jumlah	57	100%

Data demografi responden dalam tabel 4.4 di atas menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan, antara lain jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa jabatan.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden laki-laki lebih banyak, yaitu 57,9% dibandingkan responden wanita yang hanya 42,1%. Selanjutnya, responden dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S-1, yaitu sebesar 56,1%. Responden yang berpendidikan SMA/SMK sebesar 10,5%, responden yang berpendidikan Diploma sebesar 3,5% dan responden yang berpendidikan S2 sebesar 29,0%.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *corrected item-total colleration*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data dikatakan valid.

A. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Untuk menguji validitasnya variabel partisipasi anggaran dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	26,16	4,564	,641	,804	,845
X1.2	26,44	4,536	,666	,679	,841
X1.3	26,47	4,468	,729	,681	,833
X1.4	26,61	4,884	,650	,622	,846
X1.5	26,33	4,476	,603	,701	,852
X1.6	26,23	4,679	,556	,762	,857
X1.7	26,49	4,647	,640	,753	,845

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Berdasarkan uji validitas variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dengan membandingkan r hitung (kolom *Corrected Item-Total Correlation*) dengan r tabel (kolom *Product Moment* dengan signifikan 0,05 atau 5%) untuk *degree of freedom (df) = n-2*, dimana n adalah jumlah sampel penelitian sebanyak 57 responden sehingga diperoleh nilai (df) = 57-2 atau nilai df dari 55 adalah 0,2609. Pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 7 item pertanyaan dan semuanya dapat dikatakan valid dimana r hitung > r tabel, Pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan diatas besar dari **0,2609**.

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dengan 7 item pertanyaan

dapat dikatakan reliabel karena hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach Alpha* sebesar 0,868 dengan tingkat keterandalan tinggi.

Tabel.4.6

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,865	,868	7

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

A. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik (X2) yaitu Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk hasil uji validitas variabel Akuntabilitas Publik dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	31,42	4,677	,381	,424	,756
X2.2	31,18	4,040	,622	,536	,713
X2.3	31,42	4,605	,368	,317	,758
X2.5	31,35	4,446	,366	,344	,762
X2.6	30,88	4,574	,442	,572	,747
X2.7	31,26	4,269	,514	,493	,733
X2.8	31,02	4,125	,603	,610	,717
X2.9	31,02	4,410	,443	,374	,746

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dapat disimpulkan bahwa ada 8 item pertanyaan dari 9 item pertanyaan yang dikatakan valid karena r hitung > r tabel 0,2609, sedangkan untuk 1 item pertanyaan yang tidak valid yaitu item pertanyaan X1.4 dimana r hitung sebesar 0,117 < r tabel 0,2609.

Sedangkan untuk melihat reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.8. Uji reliabilitas dari 8 item pertanyaan tersebut menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,766. Nilai ini besar dari 0,6 sehingga semua instrumen dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,767	,766	8

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

A. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi (2016:163), pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode yang berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan serta menjamin ketelitian data keuangan.

Untuk hasil uji validitasnya variabel Pengendalian Akuntansi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut

Tabel 4.9
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	9,67	6,226	,583	,525	,696
X3.2	10,09	6,724	,408	,386	,790

X3.3	9,79	5,669	,699	,535	,630
X3.4	9,88	6,217	,578	,511	,698

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dapat disimpulkan bahwaada 4 item pertanyaan dari 4 item pertanyaan yang dikatakan valid karena rhitung > r tabel 0,2609.

Sedangkan untuk melihat reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.10.Uji reliabilitas dari 4 item pertanyaan tersebut menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,765. Nilai ini besar dari 0,6 sehingga semua instrumen dapat dikatakan reliabel

Tabel 4.10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,763	,765	4

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

A. Kinerja Manajerial

Menurut Natalia (2010), kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan.

Untuk hasil uji validitas variabel Kinerja Manajerial dapat dilihat pada tabel

4.11 berikut

Tabel 4.11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	20,49	6,790	,798	,698	,761
Y3	20,51	7,397	,774	,664	,775
Y4	20,35	8,053	,680	,513	,798
Y5	20,07	8,352	,598	,451	,811
Y6	21,42	6,320	,477	,404	,873
Y8	20,58	7,427	,593	,565	,804

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dapat disimpulkan bahwa ada 6 item pertanyaan dari 8 item pertanyaan yang dikatakan valid yaitu Y.1, Y.3, Y.4, Y.5, Y.6 dan Y.8 dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$, sedangkan 2 item pertanyaan lain yaitu Y.2 dan Y.7 harus dikeluarkan karena tidak valid karena nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ dimana nilai r_{hitung} untuk masing-masing item yaitu -0,214 dan $0,144 < 0,2609$.

Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 bahwa Kinerja Manajerial dengan 6 item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karena hasil

pengujian data menunjukkan *Cronbach Alpha* sebesar 0,869 dengan tingkat keterandalan tinggi. **Tabel 4.12**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,830	,869	6

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan rumus *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Untuk uji Normalitas dapat dilihat pada table 4.13

Tabel 4.13

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,94707069
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,053
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Dari output dapat dilihat bahwa signifikan (*Asymp Sig*) pada uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* mempunyai nilai **0,200** karena signifikan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (*independent*)

satu dengan variabel bebas (*independent*) yang lainnya. Dalam analisis regresi ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya (*dependent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance $> 0,1$ atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Hasil perhitungan VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesama variabel bebas dapat dilihat pada table 4.14.

Tabel 4.14
Coefficients

a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	,892	1,121
	Akutabilitas_Publik	,898	1,113
	Pengendalian_Akuntansi	,971	1,030

a. Dependent Variable: Kinerja_Majerial

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

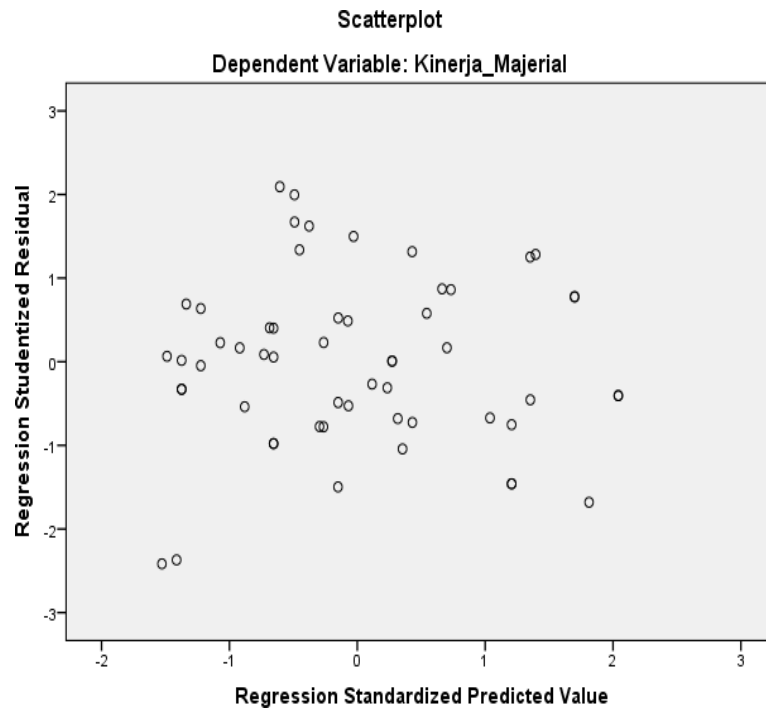
Dari hasil output pada uji multikoleniaritas di dapatkan nilai tolerance untuk masing-masing variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar $0,892 > 0,1$,

variabel akuntabilitas publik $0,898 > 0,1$ dan variabel pengendalian akuntansi $0,971 > 0,1$, sedangkan nilai VIF untuk masing-masing variabel kejelasan sasaran anggaran $1,121 < 10$, variabel akuntabilitas publik $1,113 < 10$ dan variabel pengendalian akuntansi $1,030 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik scatterplot. Pendeteksian mengenai ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat aditidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRIESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized. Berdasarkan scatterplot dibawah terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka Nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1



Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Dari hasil output pada uji heterokedastisitas dapat dilihat grafik Scatter-Plot, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik meyebar tidak beraturan diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, Kriteria pengujian dengan membandingkan antara t hitung dengan t table. Bila

t hitung < t tabel, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila t hitung > t tabel, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Kemudian dapat juga dilihat jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$ berarti variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis ialah 95% atau (α) = 0,05 (5%). Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada table 4.15.

Tabel 4.15
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,015	7,216		1,804	,077
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	,520	,173	,407	3,003	,004
Akutabilitas_Public	,140	,182	,104	,770	,445
Pengendalian_Akuntansi	,046	,130	,046	,356	,723

a. Dependent Variable: Kinerja_Majerial

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Dari tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut :

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel atau nilai sig < α 0,05.

Nilai ttabel pada α 0,05 adalah 1.672. Untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) nilai thitung adalah 3,003 > t tabel 1,672, dan nilai signifikan 0,004 < α 0,05. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 di diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y).

2. Pengujian hipotesis 2

Untuk variabel Akuntabilitas Publik (X2) nilai thitung adalah 0,770 < t tabel 1,672, dan signifikan 0,445 > α 0,05. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H2 ditolak. Artinya bahwa Akuntabilitas Publik (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y).

3. Pengujian hipotesis 3

Untuk variabel Pengendalian Akuntansi (X3) nilai thitung adalah 0,356 < t tabel 1,672, dan signifikan 0,723 > α 0,05. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 dapat ditolak. Artinya bahwa pada penelitian ini Pengendalian Akuntansi (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y).

4.3.2 Uji F (Simultan)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi.

Hasil uji F dilihat pada tabel ANOVA dalam kolom sig. dalam penelitian ini peneliti menggunakan taraf signifikansi 5%, jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011).

Hasil uji F juga dapat dilihat dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel, jika F-hitung $>$ F-tabel maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama, namun jika F-hitung $<$ F-tabel maka tidak ada pengaruh secara bersama-sama. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada table 4.16

Tabel 4.16

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83,170	3	27,723	3,018	,038 ^b
	Residual	477,687	52	9,186		

Total	560,857	55			
-------	---------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: Kinerja_Majerial

b. Predictors: (Constant), Pengendalian_Akuntansi, Akutabilitas_Publik, Kejelasan_Sasaran_Anggarn

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Berdasarkan table 4.16 diatas dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai F-hitung $3,018 > F\text{-tabel } 2,77$ atau nilai signifikan $0,03 < 0,05$, sehingga variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Akutabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial.

4.3.3 Uji Regresi Berganda

Analisa data menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan karena penelitian ini menganalisis pengaruh antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Sebagai variabel dependen adalah Kinerja Maajerial (Y), variable independennya adalah Sistim Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), AKuntabilittas Publik (X2) danPengendalian Akuntasni (X3).

Tabel 4.17

Coefficients

Model	a	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients

		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	13,015	7,216	
	Kejelasan_Sasaran_Anggarn	,520	,173	,407
	Akutabilitas_Publik	,140	,182	,104
	Pengendalian_Akuntansi	,046	,130	,046

a. Dependent Variable: Kinerja_Majerial

Sumber :Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

$$Y=13,015+0,520X1+0,140X2+0,046X3+e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstansta sebesar 13,015 artinya jika kejelasan sasaran anggaran (X1),Akuntanbilitas Publik (X2) dan Pegendalian Akuntansi (X3) tidak ada atau sama dengan Nol maka Kinerja Manajerial akan bernilai 13,015.
2. Koefisien regresi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 0,520 Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Kejelasan sasaran anggaran mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja Manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 0,520 satuan. Semakin naik nilai Kejelasan Sasara Anggaran maka semakin Naik nilai Kinerja Manajerial.

3. Koefisien regresi Variabel Akuntabilitas Publik (X2) sebesar 0,140
Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Akuntabilitas Publik mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja Manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 0,140 satuan. Semakin naik nilai Akuntabilitas Publik maka semakin naik nilai Kinerja Manajerial.
4. Koefisien regresi Variabel Pengendalian Akuntansi (X3) sebesar 0,046
Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pengendalian Akuntansi mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kinerja Manajerial akan mengalami peningkatan sebesar 0,046 satuan. Semakin naik nilai Pengendalian Akuntansi maka akan semakin naik nilai Kinerja Manajerial.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted* (R^2) berarti (R^2) sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan *adjusted* (R^2). Untuk membandingkan dua (R^2) maka harus memperhitungkan banyak variabel x yang ada dalam model. (Ghozali, 2011).

Tabel 4.18

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of
-------	---	----------	------------	---------------

			Square	the Estimate
1	,385 ^a	,148	,099	3,031

a. Predictors: (Constant), Pengendalian_Akuntansi, Akutabilitas_Publik, Kejelasan_Sasaran_Anggarn

b. Dependent Variable: Kinerja_Majerial

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 22 (2018)

Dari tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa besarnya *adjustR Square* adalah 0,099. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel Kejelasan Sasaran Anggran, Akutabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi adalah sebesar 9,9% sedangkan 90,1 % ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaeran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nilai ttabel pada α 0,05 adalah 1.672. Untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) nilai thitung adalah 3,003 > t tabel 1,672, dan nilai signifikan 0,004 > α 0,05. Nilai koefisien B dari variabel X1 bernilai yaitu 0,520 dapat di lihat pada tabel 4.14. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 di terima. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beny Arifin W (2012) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja manajerial instansi pemerintah.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Nurhalimah, dkk (2013) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah, yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur.

4.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Untuk variabel Akuntabilitas Publik (X2) nilai thitung adalah $0,770 < t \text{ tabel } 1,672$, dan signifikan $0,445 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien B dari variabel (X2) bernilai yaitu 0,140. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H2 ditolak. Artinya bahwa Akuntabilitas Publik (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Deki Putra (2013) tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris SKPD Kota Padang). Dimana Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Padang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ofalyn Octarya Sitepu (2015) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian ini Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial suatu OPD, untuk meningkatkan akuntabilitas harus ada pihak eksternal dan internal dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. Kinerja pemerintah harus menerapkan akuntabilitas yang transparan dan terukur agar mengalami peningkatan tiap tahunnya.

4.4.3 Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H3) ditolak dan disimpulkan bahwa pengendalian

akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Untuk variabel Pengendalian Akuntansi (X3) nilai thitung adalah $0,356 < t \text{ tabel } 1,672$, dan signifikan $0,723 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien B dari variabel (X3) bernilai 0,46. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 ditolak. Artinya bahwa pada penelitian ini Pengendalian Akuntansi (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y). Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H2 di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y) pada OPD Kabupaten Sijunjung.

Dalam penelitian penelitian yang dilakukan oleh Netty Herawaty (2011) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi yang menyatakan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja manajerial Instansi

Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Deki Putra (2013) tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris SKPD Kota Padang) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kota Padang.

4.4.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja manajerial Daerah

Menurut Kenis (1979) dalam Ofalyn (2015), Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Menurut Mardiasmo (2011) Akuntabilitas publik (X2) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dan Pengendalian Akuntansi (X3) menurut Mulyadi (2016:163), pengendalian akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode yang berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan serta menjamin ketelitian data keuangan. Biasanya sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat, pemegang atau penjaga barang/harta, dan pemeriksa intern.

Kinerja manajerial (Y) menurut Natalia (2010), merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada uji Simultan dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai $F\text{-hitung } 3,018 > F\text{-tabel } 2,77$ atau nilai signifikan $0,03 < 0,05$, sehingga variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Karena nilai signifikan 0,03 jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian.

Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H4 dapat diterima.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ofalyn Octarya Sitepu (2015) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, dan pengendalian akuntansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penelitian ini pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nilai t tabel pada α 0,05 adalah 1,672. Untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) nilai t hitung adalah $3,003 > t$ tabel 1,672, dan nilai signifikan $0,004 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien B dari variabel X1 bernilai yaitu 0,520 dapat di lihat pada tabel 4.14. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 di terima. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y) di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Dalam penelitian ini pada variabel Akuntabilitas Publik (X2) nilai t hitung adalah $0,770 < t$ tabel 1,672, dan signifikan $0,445 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien B dari variabel (X2) bernilai yaitu sebesar 0,140. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H2 ditolak. Artinya bahwa Akuntabilitas Publik (X2) tidak berpengaruh

terhadap Kinerja Manajerial (Y) di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

3. Dalam penelitian ini pada variabel Pengendalian Akuntansi (X3) nilai t hitung adalah $0,356 < t \text{ tabel } 1,672$, dan signifikan $0,723 > \alpha 0,05$. Nilai koefisien B dari variabel (X3) bernilai 0,46. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 dapat ditolak. Artinya bahwa pada penelitian ini Pengendalian Akuntansi (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y) di Pemerintah Kabupaten Sijunjung
4. Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja manajerial sebesar nilai F-hitung $3,018 > F\text{-tabel } 2,77$ atau nilai signifikan $0,03 < 0,05$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga Hipotesis 4 diterima, Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan pengendalian akuntansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

5.2 Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan beberapa saran :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang menunjukkan bahwa faktor kejelasan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial secara signifikan, maka peneliti mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kejelasan sasaran

anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial.

2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, diusahakan dengan menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek, atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penentuan topik penelitian												
2.	Perumusan masalah penelitian												
3.	Penulisan Proposal												
4.	Survey Awal												
5.	Memvalidasi Instrumen												
6.	Collected Data												
7.	Analisis Data												
8.	Pengujian Hipotesis												
9.	Penulisan laporan akhir												

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyari, Agus. 2008. *Anggaran Perusahaan Buku I*. Yogyakarta: BPFE.
- Angreini, Sherly Pinatik. (2014). *Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah*. Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 800-808
- Anthony & Vijay. 2015. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Beny Arifin W. (2012). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 No. 1, halaman: 15-27, Januari 2012.
- Deddi Nordiawan & Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Deki Putra. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Erlina, Sirojuzilam, dan Rasdianto. 2012. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Medan: USU Press.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat, Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah, Kapitaselekt Sistem ASP.*

Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Harini Susilowati. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta).*Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hartadi, Bambang. 1992. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen.* Yogyakarta: BPFU UGM.

Ida Ayu Made Dwiki Paramitha. (2016). *Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja Skpd Kabupaten Tabanan.* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayanan Denpasar.

Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mei Anjarwati. (2012). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*Mei Anjarwati / Accounting Analysis Journal 1 (2) (2012).

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat.

Natalia Dewinda Putri. (2010). *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial SKPD.*Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Netty Herawaty.(2011). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian*

Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora.

Ni Made Mega Cahyani, I Made Karya Utama. (2015). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.3 (2015): 825-840.

Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Ofalyn Octarya Sitepu. (2015). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Di Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Program Studi Strata I Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Sinuraya, Candra. 2009. “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan*”. Jurnal Akuntansi, Volume 1, Nomor 1. Universitas Kristen Maranatha.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Mehamami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Ummu Kaltsum, Abdul Rohman. (2012). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan*

Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga).DIPONEGORO JOURNAL OF

ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 2.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN : 1023078301
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ IIIId
Jabatan Fungsional : Lektor


Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten Sijunjung)**, yang dilaksanakan pada tahun akademik 2018/2019 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 21 Februari 2019


Mengefahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
(Jutta Surkaini, SE.M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Siska Yulia Defitri, SE.M. Si)
NIDN. 1023078301

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402